



REFLEKSI KINERJA APBD SETELAH PEMEKARAN DAERAH: APA KABAR KALTIM?

Diana Pujianty¹, Puji Wibowo²

¹STIE DR. Moechtar Talib

²Politeknik Keuangan Negara STAN

¹dianapujianty47@gmail.com

²puji.wibowo@pknstan.ac.id; 082161088546

Abstract

East Kalimantan is well-know as natural resources-rich region, particularly associated with oil and gas. Since 2012, this province has been splited into two regions, East Kalimantan with 10 regencies/municipalities and the new province, North Kalimantan has administered 5 cities. Regional Budget (APBD) performances have been affected by this policy. This research aims to compare regional and local budget performances before and after East Kalimantan split. It is confirmed that there were statistically differences between those two regime periods, associated with decentralization ratio, interdependency ratio, and capital expenditure ratio, and unexpected expenditure ratio in East Kalimantan budget. Meanwhile, it has been discovered that there were no statistically differences before and after regional expansion in terms of all local budget ratio.

Keywords : *APBD Performance, Regional Expansion, East Kalimantan Province, Financial Ratio*

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang identik dengan kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi. Sejak tahun 2012, Provinsi yang sarat dengan tambang emas hitam ini dipecah menjadi dua wilayah, yakni Kalimantan Timur yang membawahi 10 kabupaten/kota dan Kalimantan Utara yang membawahi 5 kabupaten/kota. Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Penelitian ini bermaksud membandingkan kinerja APBD baik sebelum maupun sesudah pemekaran daerah dengan menggunakan indikator umum performa APBD. Berdasarkan uji beda, diketahui bahwa terdapat perbedaan kinerja APBD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara sebelum dan setelah pemekaran daerah untuk indikator rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio belanja modal dan rasio belanja tidak terduga. Sementara untuk pemerintah kab/kota yang ada pada Provinsi Kalimantan Timur relatif tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kinerja APBD untuk semua indikator rasio keuangan baik sebelum maupun setelah pemekaran daerah.

Kata kunci: *Kinerja APBD, Pemekaran Daerah, Kalimantan Timur, Rasio Keuangan*



PENDAHULUAN

Pemekaran daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 (satu) butir a berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Pada awal kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki 8 (delapan) provinsi. Jumlah provinsi tersebut terus mengalami perkembangan. Pemekaran provinsi pertama kali terjadi pada tahun 1950 dimana Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pemekaran provinsi terbaru terjadi pada tahun 2012 dimana Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Sebelum pemekaran daerah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 14 kota/kabupaten. Pemekaran daerah tersebut membuat Provinsi Kalimantan Timur kini hanya memiliki 9 kota/kabupaten dimana 5 kota/kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Namun pada tahun 2013 wilayah Kabupaten Kutai Barat yang termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga Provinsi Kalimantan Timur kini memiliki 10 kota/kabupaten.

Setiap pemerintahan daerah memiliki dokumen penganggaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen APBD tersebut merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam penelitiannya, Mengkuningtyas (2008) menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Menurut Nugroho (2016) bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan masih rendah untuk periode 2006 s.d. 2014. Sementara itu, Azhar (2008) berpendapat bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk desentralisasi fiskal pada era sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Adapun hasil penelitian Sucandrawati (2016) terhadap Provinsi Lampung menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal rasio belanja operasi terhadap total belanja pada APBD kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa potret kinerja keuangan daerah baik sebelum maupun setelah pemekaran daerah belum menunjukkan keseragaman pola. Hal ini terbukti dari belum adanya konsistensi hasil penelitian antardaerah dan antarwaktu.

Perbedaan hasil riset tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk meneliti kembali persoalan kinerja keuangan daerah setelah adanya pemekaran dengan mengambil objek maupun rasio keuangan yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja APBD antara sebelum dan sesudah pemekaran. Objek penelitian kali ini berupa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*incumbent region*). Sementara indikator kinerja keuangan diperluas dengan menggabungkan indikator-indikator kinerja pada penelitian sebelumnya dan menambahkan indikator lain yaitu rasio



ketergantungan keuangan daerah, rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja daerah. Ketiga rasio tersebut penting digunakan dalam penelitian ini mengingat persoalan klasik yang kerap kali muncul dalam kebijakan pemekaran adalah terkait otonomi daerah dan kapasitas pengelolaan APBD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data data sekunder berupa APBD yang diperoleh dari laman resmi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui literatur review dan observasi non perilaku (*nonbehavioral observation*). Jenis observasi non perilaku yang digunakan adalah analisis catatan. Analisis catatan dapat berupa pengumpulan data, dimana data tersebut adalah data sekarang atau catatan data historis (Sugiyono 2015).

Pada penelitian ini populasi juga merupakan sampel penelitian. Populasi yang digunakan adalah pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2008-2015.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan dimana rasio-rasio keuangan tersebut akan diuji dengan menggunakan uji normalitas dan uji beda. Rasio-rasio keuangan tersebut adalah rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, rata-rata rasio keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali untuk rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri terutama setelah adanya pemekaran daerah (lihat Tabel 1).



Tabel 1
Rata-rata Rasio Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Rasio Keuangan	Sebelum Pemekaran	Setelah Pemekaran
Derajat Desentralisasi	40%	52%
Ketertanggungjawaban Keuangan Daerah	60%	46%
Kemandirian Keuangan Daerah	67%	115%
Efektivitas PAD	148%	113%
Efisiensi	97%	105%
Belanja Operasi	58%	57%
Belanja Modal	26%	22%
Belanja Tidak Terduga	15%	21%
Efisiensi Belanja Daerah	105%	101%

Sementara itu, rata-rata rasio keuangan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum pemekaran daerah dengan setelah pemekaran daerah.

Tabel 2
Rata-Rata Rasio Keuangan Seluruh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Rasio Keuangan	Sebelum Pemekaran	Setelah Pemekaran
Derajat Desentralisasi	6%	8%
Ketertanggungjawaban Keuangan Daerah	87%	80%
Kemandirian Keuangan Daerah	7%	10%
Efektivitas PAD	122%	132%
Efisiensi	96%	102%
Belanja Operasi	60%	58%
Belanja Modal	40%	42%
Belanja Tidak Terduga	1%	0%
Efisiensi Belanja Daerah	83%	92%



Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan memiliki distribusi

normal jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian adalah uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel 3
Uji Normalitas Rasio Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Rasio	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
	Kol. - Smirnov	Sig. (2-tailed)	Kol. - Smirnov	Sig. (2-tailed)
Derajat Desentralisasi	0,34	1,00	0,47	0,98
Ketergantungan Keuangan Daerah	0,34	1,00	0,70	0,71
Kemandirian Keuangan Daerah	0,35	1,00	0,63	0,83
Efektivitas PAD	0,51	0,96	0,61	0,85
Efisiensi	0,57	0,90	0,40	1,00
Belanja Operasi/Total Belanja	0,38	1,00	0,43	0,99
Belanja Modal/Total Belanja	0,44	0,99	0,52	0,95
Belanja Tak Terduga/Total Belanja	0,52	0,95	0,47	0,98
Efisiensi Belanja Daerah	0,44	0,99	0,83	0,50

Pada Provinsi Kalimantan Timur, baik sebelum dan setelah pemekaran daerah memiliki nilai asymp. sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal

ini berarti data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik sebelum dan setelah pemekaran daerah merupakan data berdistribusi normal.



Tabel 4
Uji Normalitas Rasio Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Rasio	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
	Kol. - Smirnov	Sig. (2-tailed)	Kol. - Smirnov	Sig. (2-tailed)
Derajat Desentralisasi	0,57	0,91	0,38	1,00
Ketergantungan Keuangan Daerah	0,54	0,93	0,59	0,87
Kemandirian Keuangan Daerah	0,57	0,91	0,48	0,98
Efektivitas PAD	0,44	0,99	0,73	0,66
Efisiensi	0,27	1,00	0,41	1,00
Belanja Operasi/Total Belanja	0,45	0,99	0,70	0,71
Belanja Modal/Total Belanja	0,43	0,99	0,70	0,71
Belanja Tak Terduga/Total Belanja	0,88	0,42	0,00	0,00
Efisiensi Belanja Daerah	0,61	0,85	0,57	0,90

Pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, baik sebelum dan setelah pemekaran daerah memiliki nilai *asympt. sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data

seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur baik sebelum dan setelah pemekaran daerah berdistribusi normal.



Tabel 5
Uji Beda Rasio Keuangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Rasio	Correlation	Sig.	Sig. (2-tailed)
Derajat Desentralisasi	0,398	0,602	0,028
Ketergantungan Keuangan Daerah	0,081	0,919	0,035
Kemandirian Keuangan Daerah	0,097	0,903	0,057
Efektivitas PAD	-0,488	0,512	0,135
Efisiensi	0,444	0,556	0,374
Belanja Operasi/Total Belanja	0,418	0,582	0,354
Belanja Modal/Total Belanja	0,609	0,391	0,048
Belanja Tak Terduga/Total Belanja	0,891	0,109	0,039
Efisiensi Belanja Daerah	0,905	0,095	0,298

Pada penelitian ini teknik uji beda yang digunakan adalah uji dua sampel berhubungan atau uji *paired sample t test*. Uji *paired sample t test* merupakan uji beda untuk dua sampel data berpasangan yang mengalami perlakuan berbeda. Penelitian ini membandingkan data pada Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan setelah pemekaran daerah.

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa nilai sig. (2-tailed) rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio belanja modal dan rasio belanja tidak terduga pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan secara signifikan antara nilai rasio-rasio tersebut sebelum pemekaran daerah dengan nilai setelah pemekaran daerah. Sedangkan untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan nilai rasio-rasio tersebut secara signifikan baik sebelum maupun setelah pemekaran daerah.



Tabel 6
Uji Beda Rasio Keuangan Seluruh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Rasio	Correlation	Sig.	Sig. (2-tailed)
Derajat Desentralisasi	0,051	0,949	0,08
Ketergantungan Keuangan Daerah	-0,006	0,994	0,133
Kemandirian Keuangan Daerah	0,032	0,968	0,094
Efektivitas PAD	-0,001	0,999	0,681
Efisiensi	-0,077	0,923	0,605
Belanja Operasi/Total Belanja	-0,099	0,901	0,671
Belanja Modal/Total Belanja	-0,144	0,856	0,556
Belanja Tak Terduga/Total Belanja	0	0	0,058
Efisiensi Belanja Daerah	-0,246	0,754	0,134

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa nilai sig. (2-tailed) rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio belanja tidak terduga dan rasio efisiensi belanja pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan nilai rasio-rasio tersebut secara signifikan baik sebelum maupun setelah pemekaran daerah. Meskipun rasio kinerja APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan antara dua periode tersebut, namun perubahan tersebut tidak signifikan secara statistik. Penulis menduga, berkurangnya jumlah pemerintahan kabupaten/kota kurang

memacu kompetisi antardaerah sehingga daerah lebih memilih berada dalam zona nyaman dengan mempertahankan status quo pengelolaan keuangan APBD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan kinerja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara sebelum dan setelah pemekaran daerah untuk indikator rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio belanja modal dan rasio belanja tidak terduga. Penulis menduga pemekaran daerah berupa pemisahan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi



Kalimantan Utara lebih memberikan dampak pada APBD Provinsi Kalimantan Timur karena keberhasilan mereka untuk tetap menggali potensi daerahnya dan merubah pengelolaan belanja modal dan belanja tidak terduga.

2. Kinerja APBD untuk seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur baik sebelum dan setelah pemekaran daerah relatif tidak berbeda untuk indikator rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi pendapatan, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio belanja tidak terduga dan rasio efisiensi belanja daerah. Kurangnya semangat berkompetisi diduga menyebabkan *status quo* pengelolaan APBD. Hal ini sejalan pula dengan penelitian Mengkuningtyas (2008), Sucandrawati (2016), dan Nugroho (2016). Kompetisi atau persaingan antardaerah seyogianya terbangun untuk meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya (Davoodi dan Zou 1998:244 dalam Wibowo 2008).

Saran

1. Daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah pemekaran daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer.
2. Kebijakan pemekaran daerah perlu disertai dengan analisis biaya dan manfaat khususnya terkait aspek fiskal yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.
3. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur.

4. Penelitian kuantitatif deskriptif ini akan memberikan hasil yang lebih bermakna apabila dilengkapi dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait baik para ahli di bidang keuangan daerah, maupun para pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, kita bisa menyapa mereka dengan lembut, "Apa kabar, Kaltim?". Disamping itu, riset ke depan diharapkan dapat memberikan komparasi kebijakan pemekaran daerah di negara lain, khususnya negara yang memiliki karakteristik seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Satya. (2008). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah*. <http://repository.usu.ac.id>. (Diakses 16 Maret 2017).

Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Gorontalo:Indeks. <http://www.kaltimprov.go.id>. (Diakses 10 Februari 2017).

<http://www.djpk.depkeu.go.id>. (Diakses 11 Februari 2017).

<http://www.bps.go.id>. (Diakses 1 Maret 2017).

<http://www.kemendagri.go.id>. (Diakses 3 Maret 2017).



- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mengkuningtyas, Yeni. (2008). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran*.
<http://download.portalgaruda.org>.
(Diakses 16 Maret 2017).
- Nordian, Deddi, dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Prayudi. (2016). *Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya*.
<http://jurnal.pknstan.ac.id>. (Diakses 15 Maret 2017)
- Rizki, Agung Muhammad. (2007). *Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan undang-undang otonomi daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004*.
<http://repository.widyatama.ac.id>.
(Diakses 16 Maret 2017).
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sucandrawati, Ni Komang Ayu. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*.
<http://digilib.unila.ac.id>. (Diakses 15 September 2017).
- Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- _____. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____. PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
- _____. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wibowo, Puji. (2008). *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Keuangan Publik Vol 5(1):55-83.